

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Arief, Barda N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini. (2006). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ariman. R & Raghib. F (2016). *Hukum Pidana ; Cetakan Kedua*. Malang : Setara Press.
- Efendi, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (1 ed.). Prenadamedia Group.
- Diantha, P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi teori Hukum*. Prenada Media.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Nomor 112). Deefpublish.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hardum, S. Edi. (2016). *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- Kertonegoro. (2016). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Prenada Media, Jakarta.
- Muhaimin.. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. In Sarjiyanti (Ed.), *ase Pustaka* (Vol. 2). Oase Pustaka.

Sinurat, Aksi. (2023) Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, Kupang :
Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang.

Soekanto. S (2004) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta:Rajawali Pers.

Sumolang, Amie Z. Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang
Dan Penyeludupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*. 8(2).

Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. In Kadarudin (Ed.),
Hukum Pidana. Pustaka Pena Press.

Suyanto, (2018) Pengantar Hukum Pidana. Buku Pengantar Hukum Pidana,
Yogyakarta, :Deepublish.

Takdir. (2013). Mengenal Hukum Pidana. *Laskar Perubahan*.

Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan
Nasional*.

Waluyo B. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

Wibowo, A. P., Fransiska, A., Nugroho, F. . E., Feronica, Adipradana, N., &
Windayani, T. (2020). *Penanggulungan Tindak Pidana Perdagangan
Orang: Kajian Hukum Dalam Perspektif Nasional Dan Internasional*.
Universitas Katolik Indonesia Atma jaya.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian
Gabungan* (1 ed.). K E N C A N A.

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

Amin, I. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam
Meminimalisir Kejahatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 26–34.

- Ammar, M., & Prasetyo, D. (2018). Peran Keimigrasian Dalam Menanggulangi Masalah Perdagangan Manusia Serta Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (The Role Of Immigration In Solving The Problem Of Human Trafficking and Indonesian Labor Supervision). 1–18.
- Bachtiar, A. I. A., & Indawati, Y. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 160–175.
- Correia, M., & Monteiro, S. (2024). Fenomena Tindak Kejahatan Perdagangan Orang Di Timor-Leste Dan Upaya Pencegahannyastudi Kasus: Di Departemen Investigasi Kriminal Pntl. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10, 49–75.
- Dana, K. B. R. A., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 53–67.
- Laksono, T. B. (2019). Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepistakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal Of Law And Border Protection*, 1(2), 127–138.
- Lazuardi, A., & Elda, E. (2023). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. *Unes Law Review*, 6(1), 1510–1519.

- Purwanto, Komang A.T., Yuliartini Rai N.P, Sudika Mangku. D.G "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2019): 113-123.
- Putra, F. M. T., & Wiraputra, A. R. (2020). Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 59–70.
- Putravianito, H. E., Pujiyono, & Soemarmi, A. (2019). Peran Kantor Imigrasi Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Qudus, M. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 26.
- Rabbani, N. H., Kurniawan, R. A., & Fatana Suastrin. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penduduk Memutuskan. *Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(2), 13–23.
- Romli, Moh., & Rahayu, Devi. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 11(1), 172-187
- Rosyda, F. S. (2019). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 7–14.
- Samad, M. Y., Amanda, N., Manggarabani, M. T. C., Wastitya, N., Aziz, A., & Maya, H. B. (2022). Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran

Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis.
Jurnal Lemhannas RI, 11(4), 260-272.

Sari, Meita S dan Muhammad Zefri. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2019.

Sarmawati, E. R. (2022). Tindak Pidana Penyeludupan Manusia dan Penerapan Pidananya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai). *JIM Bidang Hukum Pidana*. 6(4), 377-385.

Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. 8(1).

Sumolang, Amie Z. Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyeludupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*. 8(2).

Syahrin M. Alvi. (2019). Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris. *Majalah Hukum Nasional*, 59–89.

Veda, J. A., Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, & Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 1–130.

Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana Hukum*, IX(April), 107–120.

Yulianti, N. L. P., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Oleh

Warga Negara Asing Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(April), 91–100.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng dalam Penempatan dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 5(3), 248–253.

Zakiri, Z., & Mahfud. (2017). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 190–198.

SKRIPSI / TESIS / DISERTASI

Listina, L. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Palembang Tahun 2018*. Skripsi (Diterbitkan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Prasasti, A. H. (2021). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Tesis (Diterbitkan) Fakultas Pascasarjana, Universitas Batanghari.

Wardana, M. S. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Di Kota Medan*. Skripsi (Diterbitkan) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

ARIKEL DALAM INTERNET

Brida, A. (01 Juni 2022). *Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Buleleng*.

Diakses pada tanggal 01 Pebruari 2025, dari https://brida.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/44-luas-wilayah-kecamatan-di-kabupaten-buleleng#:~:text=LUAS%20WILAYAH%20KECAMATAN%20DI%20KABUPATEN%20BULELENG%20*,%20Kecamatan%20Tejakula%20dengan%20luas%2097%2C68%20km%C2%B2 .

Giane. (16 Januari 2024). *Menekan Pertambahan Kasus Perdagangan Orang*.

Diakses pada 02 Nopember 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/menekan-pertambahan-kasus-perdagangan-orang>.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (05 Januari 2024). *Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024*. Diakses tanggal 04 September 2024, dari <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1611#:~:text=Nilai rata-rata UMP tahun,2024 adalah 2.557.523 perusahaan>.

Pemkab Buleleng. (2021). *Sejarah Kota Singaraja*. Diakses pada tanggal 01 Pebruari 2025, dari https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/30_sejarah-kota-singaraja.

Wong, Donnox. (24 Nopember 2023). *Sosialisasi Proaktif: Imigrasi Singaraja Maksimalkan Pencegahan TPPO dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Mengantisipasi PMI Non-Prosedural*. Diakses pada tanggal 24 Januari 2025, dari <https://frekuensimediabali.com/2023/11/24/sosialisasi-proaktif-imigrasi-singaraja-maksimalkan-pencegahan-tppo-dan-keterlibatan-masyarakat-dalam-mengantisipasi-pmi-non-prosedural/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran negara
Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Surat Edara Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor IMI IMI.4-GR.04.01-691 Tahun 2023 Tentang
Pembentukan Desa Binaan Imigrasi.

